

# Titik Balik di 2011

Tantangan terbesar menurunkan tingkat suku bunga ada di inflasi. Dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan, Indonesia memang akan sulit menciptakan inflasi rendah.

Asep Toha

**M**ENJALANKAN peran kebank-sentralan bak melakoni peran gelandang dalam sebuah ke-sebelasan sepak bola. Seorang gelandang bukan saja mahir menyokong penyerang, tapi juga jadi garda terdepan pertahanan sebelum bola memasuki wilayah pemain belakang.

Inilah lakon yang harus dijalani Bank Indonesia (BI) dan sosok Darmin Nasution sebagai gubernur terpilih. Selain membantu pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, juga jadi penyeimbang dalam menjaga eksekutif pertumbuhan ekonomi, yakni inflasi.

Karena itu, sebagai pejabat gubernur terpilih, Darmin punya sejumlah target yang

harus dicapai BI. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatra Utara, 21 Desember 1948 ini pun, mematok 2011 sebagai titik balik BI.

Langkah menuju titik balik tersebut, utamanya diprioritaskan pada perbaikan kualitas pengawasan bank di awal. Pasalnya, titik ini menjadi lubang dan sorotan banyak pihak terkait fungsi dan peran BI.

Kemudian, pengendalian inflasi, peningkatan intermediasi bank dalam perannya menyokong pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan iklim perbankan yang efisien, dengan suku bunga kredit rendah, sebagai target-target berikutnya.

Untuk target pertama, terkait kualitas pengawasan bank, Darmin mengaku sebagian kebijakan telah dijalankan termasuk pengaturannya. Dengan demikian pengawasan BI akan jauh berbeda dengan

di masa lalu.

Menurutnya, masalah pengawasan disebabkan persoalan sistem yakni sejak dari Undang-Undang (UU) No 10/1998 tentang Perbankan, hingga aturan teknisnya.

Dia mengambil satu contoh sumber persoalan di aturan tersebut. Yakni pada kata 'dapat' di pasal penanganan bank bermasalah.

Konsekuensi dari kata ini, tegas Darmin, pengawas harus menanggung risiko secara pribadi ketika penanganan tidak sesuai rencana. "Di UU, itu cukup lumrah. Di pajak itu juga banyak. Kuncinya di aturan turunannya, (seharusnya) tidak boleh lagi ada kata 'dapat'."

Kemudian, BI juga kini mempertegas batas waktu bank berada dalam status pengawasan intensif. Saat ini tidak ada batasan waktu. Karena itu, status bisa bertahan seumur

hidup, asal bank memiliki rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) di atas 8%. "Jadi yang terjadi di sejumlah bank, itu mereka tidak masuk ke pengawasan khusus, tapi terus-terusan di pengawasan



Di struktur pasar ada pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dalam proses distribusi barang. Artinya, di berbagai produk, selalu ada pemain dominan yang memungkinkan memengaruhi pembentukan harga."

intensif," jelas Darmin.

Ke depan, ada batasan waktu, sampai kapan sebuah bank bisa berada dalam pengawasan intensif. Langkah-langkah itu-lah, menurut Darmin, menjadi prioritas BI karena paling banyak memengaruhi pandangan orang.

## Suku bunga

Kemudian terkait tingkat suku bunga, Darmin menjelaskan, "Tingkat bunga sekarang ini adalah tingkat bunga pasar paling murah jika dibandingkan dengan 30 sampai 40 tahun lalu."

Dia membandingkan, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 7%-8%, kreditanya berjalan, namun tingkat suku bunga kredit saat itu berada di 18%-20%.

Tetapi, ekonom lulusan Universitas Sorbonne Paris, Prancis, ini mengakui tingkat suku bunga saat ini, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, memang tetap kurang rendah.

"(Tetapi), inti persoalan suku bunga ini sebenarnya berawal dari inflasi. Sekarang ini, inflasi Indonesia rata-rata sebesar 5%-6%. Angka ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang sudah bertahun-tahun inflasinya berada di kisaran 2%-3%, atau Filipina di 3%-4%."

Karena itu, tantangan terbesar untuk menurunkan tingkat suku bunga ada di persoal-

an inflasi. Dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan, Indonesia memang akan sulit menciptakan inflasi rendah. Kondisi ini diperparah minimnya infrastruktur dan moda transportasi.

"Bukan itu saja, di struktur pasar kita ada pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan di dalam proses distribusi barang-barang. Artinya berbagai produk itu, selalu ada pemain-pemain yang cukup dominan yang memungkinkan mereka memengaruhi pembentukan harga," tukasnya.

Karena itu, Darmin mengakui, efektivitas kebijakan moneter memengaruhi harga sedikit terbatas. Pasalnya, selain faktor *administered price* misalnya kenaikan biaya surat tanda nomor kendaraan (STNK), efektivitas kebijakan itu tereduksi oleh persoalan musim.

Dengan demikian, meskipun jika dilihat di inflasi inti (*core inflation*) posisinya di 4%, inflasi tahunan berada di level 6,2% (*year on year / yoy*).

Dengan demikian, dilema kebijakan moneter ialah menyeimbangkan tekanan inflasi

dengan kecukupan likuiditas. Kebijakan moneter terlalu ketat mungkin dampaknya ke inflasi bisa positif, tapi perbankan bisa kesulitan likuiditas untuk memberikan kredit. Jadi kebijakan BI itu mencari titik agar inflasi tidak tinggi, tapi kredit tetap lancar. "Itu gampang diucapkan tapi melaksanakannya sulit," ujarnya.

Dia lalu menguraikan, untuk masalah kredit, BI sedang menyiapkan aturan. "Kalian pernah dengar aturan LDR-GWM."

Dalam catatan *Media Indonesia*, terkait aturan giro wajib mi-

nimum (GWM) dan rasio kredit terhadap dana simpanan (*loan to deposit ratio*/LDR), BI memang tengah menyusun regulasi.

Rencananya, BI akan menetapkan besaran LDR pada level 75%-105% untuk menghitung GWM perbankan. Misalnya, jika LDR sebuah bank berada pada kisaran tersebut, nilai GWM tetap 5%. Namun, jika ada yang lebih atau kurang dari kisaran tersebut, akan mendapat penalti, misalnya GWM lebih dari 5%. "Kita percaya itu bisa mendorong penyaluran kredit."

Selain itu, BI juga tengah menyiapkan kebijakan untuk menekan suku bunga dengan mewajibkan bank mengumumkan *prime lending rate*-nya setiap bulan.

Dengan gambaran tadi, Darmin mengatakan, perbaikan sebenarnya sudah terjadi. Beberapa di antaranya telah dilaksanakan, sebagian menunggu aturan resmi. "Dengan begitu, sebenarnya akhir tahun ini semua sudah *in place*. Jadi pada 2011 awal, itu semua bisa mulai bekerja penuh dengan baik." (E-1)

## DARMIN NASUTION

<b>Tempat/Tgl Lahir</b>	: Tapanuli, 21 Desember 1948
<b>Agama</b>	: Islam
<b>Jabatan Terakhir</b>	: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia/ Pjs Gubernur Bank Indonesia
<b>Status Perkawinan</b>	: Menikah, 2 Anak

### Ikhtisar Jabatan :

Dosen FEUI, 1976-Sekarang  
Wakil Kabid Peneliti LPEM-UI, 1987-1989  
Kepala LPEM-UI, 1989-1993  
Asmenko I Indag, 1993-1995  
Asmenko I Prodis, 1995-1998  
Asmenko I Wanbangan, 1998-2000  
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, 2000-2005  
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, 2005-2006  
Direktur Jenderal Pajak, 2006-2009  
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, 2009-2010

### Jabatan-Jabatan Lain :

Anggota Dewan Komisaris PT (persero) Reasuransi Umum Indonesia, 1989-1995  
Anggota Dewan Komisaris PT (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1995-2000  
Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo I, 1998-2002  
Presiden Komisaris PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium), 1998-2002  
Komisaris Utama PT (persero) Bank BTN, 2000-2001  
Komisaris Utama Bank Danamon Indonesia, 2002-2003  
Anggota Dewan Komisaris PT (persero) Bank Mandiri, 2003-2005  
Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan, 2005-2009

### Tanda Penghargaan :

Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, 1996  
Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI, 1997  
Satyalencana Karya Satya XX dari Presiden RI, 1999  
Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, 2010



asep@  
mediaindonesia.com

MIRAMANI

PT (PERSERO) JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG & ANAK PERUSAHAAN					
LAPORAN KEUANGAN					
NERACA KONSOLIDASIAN			LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI		
Per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Ribuan Rupiah)			Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Ribuan Rupiah)		
AKTIVA	2009	2008	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2009	2008
Kas dan setara kas	70.578.207	53.903.745	Kewajiban		
Penyisihan dana untuk penyelesaian kewajiban/komitmen Perusahaan	-	3.933.183	Hutang usaha	2.231.852	4.652.806
Piutang usaha			Hutang lain-lain	2.633.541	1.847.942
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 9.274.837 pada tahun 2008 dan Rp. 8.606.951 pada tahun 2007)	20.889.509	6.108.998	Biaya masih harus dibayar	5.513.709	2.829.923
Piutang lain-lain			Hutang pajak	3.619.074	2.798.825
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu masing-masing sebesar Rp. 69.675 pada tahun 2008 dan tahun 2007)	907.906	1.477.025	Pendapatan yang ditangguhkan	8.735.880	5.983.056
Persediaan	18.425.516	16.303.279	Jaminan sewa & utilitas	8.020.739	7.179.123
Pajak dibayar dimuka	295.859	295.859	Estimasi imbalan pasca kerja karyawan	1.056.106	952.802
Biaya dibayar dimuka	166.114	163.456	Cadangan biaya pengurangan perkara tanah	300.000	300.000
Penyerahan pada anak perusahaan			Taksiran kewajiban pengembangan kawasan di masa mendatang	-	-
Aktiva tetap			Jumlah Kewajiban	32.110.900	26.544.477
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 23.749.017 pada tahun 2008 dan Rp. 22.044.969 pada tahun 2007)	49.124.459	51.020.899	Bagian minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(12.694)	(8.509)
Bangunan dalam penyelesaian	216.991	49.271	Ekuitas		
Aktiva pajak tangguhan	2.270.882	2.028.554	Modal Saham		
Aktiva lain-lain			(Modal dasar sebesar Rp. 100.000.000 ribu terdiri dari 100.000 lembar saham, dg nilai nominal Rp. 1.000 ribu per lembar saham dan telah ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada tahun 2008 dan 2007)	80.000.000	50.000.000
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp. 9.882.969 pada tahun 2008 dan Rp. 7.317.007 pada tahun 2007)	10.551.266	8.936.196	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	3.122	3.122
Jumlah aktiva	173.426.709	144.220.465	Saldo laba		
			Ditentukan penggunaannya	40.621.303	62.122.388
			Tidak ditentukan penggunaannya	20.754.078	5.558.988
			Jumlah ekuitas	141.328.503	117.684.496
			Jumlah kewajiban dan ekuitas	173.426.709	144.220.465

KOMISARIS DAN DIREKSI	
<b>Komisaris :</b>	
Komisaris Utama	: Gebyar H. Triono
Komisaris	: Agus Suharyono
Komisaris	: Ide Zakaria
<b>Direksi :</b>	
Direktur Utama	: Agus Dwitarto
Direktur Keuangan	: Machfud Arief Effendi
Direktur Operasional	: Dicky Digoyo

Jakarta, 16 Agustus 2010	
Direksi	
Ttd	Ttd
Machfud Arief Effendi	Agus Dwitarto

PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) CABANG CIREBON	
PENGUMUMAN PELELANGAN	
Nomor : 84 / Pan.pel / VIII / 2010	
1.	Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Seleksi Rekanan Penyedia Barang/Jasa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon bermaksud mengadakan Pelelangan Pekerjaan :
<b>"PENGADAAN 1 (SATU) UNIT WHEEL LOADER KAPASITAS 5 TON PELABUHAN CABANG CIREBON"</b>	
Pagu Anggaran	: Rp. 2.000.000.000,-
Sumber Anggaran	: Anggaran Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon.
3.	Waktu & Tempat Pendaftaran :
Hari	: Senin s/d Jum'at.
Tanggal	: 16 s/d 20 Agustus 2010.
Waktu	: Jam 09.00 s/d. 16.00 WIB (Istirahat jam 12.00 s/d. 13.00 WIB) kecuali Jum'at istirahat jam 11.30 s/d. 13.30 WIB).
Tempat	: Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon, Jln. Pertierra No. 4, Cirebon.
4.	Syarat - syarat Pendaftaran
Kepada perusahaan yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy dokumen, sebagai berikut :	
a.	Membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan apabila mewakili, surat kuasa ditandatangani pimpinan perusahaan diatas materai bertanggal dan diberi stempel cap perusahaan serta dilampiri dengan fotocopy KTP pemberi kuasa (pimpinan perusahaan) dan penerima kuasa.
b.	Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Bidang Pengadaan Alat Berat dengan kualifikasi golongan usaha Menengah (M) atau Besar (B).
c.	Mempunyai Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan Departemen Hukum dan HAM.
d.	Mempunyai pengalaman kerja pada pekerjaan Pengadaan Alat Berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 1 (satu) kali dengan kontrak pekerjaan minimal senilai Rp. 1,25 milyar rupiah lengkap dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
e.	Mempunyai Bukti Setoran Pajak Tahun 2009 dan 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli) Tahun 2010.
5.	Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada website www.inaport2.co.id atau papan pengumuman pada Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon Jalan Pertierra No. 4, Cirebon.
Cirebon, 16 Agustus 2010	
Ttd	
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN SELEKSI REKANAN PENYEDIA BARANG/JASA PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG CIREBON	